

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah atau pemilihan langsung yang sekarang lebih dikenal dengan pilkada merupakan kebijakan pemerintah dan telah menjadi mesin politik utama demokratisasi. Dorongan ini sejalan dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, yang hanya dapat dicapai dengan memulihkan kedaulatan rakyat.

Pilkada merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi, mendidik masyarakat untuk melihat dan berpikir tentang peristiwa politik di tingkat daerah secara objektif, sehingga masyarakat tidak lagi hanya mengikuti mentalitas politik dan perilaku elit politik, tetapi juga berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “Gubernur, Bupati dan WaliKota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Signifikansi demokrasi dapat memiliki makna ganda dapat dipilih langsung oleh rakyat, atau dipilih langsung oleh legislatif yang mewakili rakyat.

Oleh karena itu, dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi sebuah dasar acuan dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah sebagai pencapaian dimasyarakat dalam hal demokrasi

Dimana demokrasi diharapkan sejalan dengan tujuan reformasi di atas. Dalam konteks demokratisasi masyarakat yang sadar demokrasi adalah langkah awal menuju demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah tak lepas dengan isu-isu yang ditampilkan dalam proses kampanye suatu partai politik dalam mengukung kandidatnya dengan penggunaan isu putra daerah yang ditonjolkan dalam meraup suara. Namun dalam pelaksanaannya identitas putra daerah tidak diartikan sebagai suku yang hanya berasal dari daerah atau dari daerah saat ini. Namun pengertian putra daerah memiliki arti yang luas tergantung dari objek yang kita lihat dan sudut pandangnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pengertian yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang terjadi dimana dalam hal ini dibagi menjadi 2 sudut pandang biologis dan politik.

Menurut Samuel P. Huntington, putra daerah dapat dibagi menjadi dua kategori, putra daerah geologis dan putra daerah politik artinya silsilah seseorang yang lahir di daerah tersebut. Yaitu mereka yang lahir di daerah tersebut dan mereka yang tidak lahir di daerah tersebut tetapi orang tuanya berasal dari daerah tersebut. (Huntington, 2003) Setidaknya kita bisa membagi putra daerah menjadi beberapa tingkatan. Yakni putra daerah geografis dan biologis, yaitu calon yang lahir di daerah itu, baik dari orang tua asli daerah itu maupun dari orang tua yang tinggal di luar daerah itu.

Serta putra daerah politik dimana istilah putra daerah politik memiliki kedudukan anak laki-laki dari suatu wilayah politik semata-mata didasarkan pada hubungan biologis (dari orang tuanya), meskipun sebelumnya ia tidak pernah memberikan kontribusi kepada wilayah tersebut, baik secara politik maupun ekonomi. Tuntutan putra daerah ini biasanya muncul ketika seseorang menunjukkan kepentingan politik pragmatis di daerah asal.

Fenomena Putra Daerah juga kerap dimanfaatkan oleh kelompok politik untuk mematahkan tuntutan calon dari luar daerah. Permainan pertanyaan dasar dalam proses seleksi bukan lagi hal baru. Meski terkesan seperti strategi politik klasik, namun isu-isu primitif yang diangkat masih berjalan lancar dalam pemilihan kepala daerah di banyak daerah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi pada proses kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon gubernur yang menggunakan isu putra daerah sebagai salah satu kekuatan dalam meraih suara dalam pemilihan kepala daerah (Fransin, 2017)

Fenomena yang terjadi terhadap isu putra daerah cenderung terlibat dalam konteks kesukuan dimana kesukuan juga memiliki pengaruh terhadap masalah yang ditimbulkan .hal ini terlihat dari fakta dilapangan bahwa pemilih masyarakat Kota Tanjungpinang bahwa isu kesukuan juga memiliki dampak dalam kampanye dan keterpilihan . Masalah tersebut juga muncul setiap kali partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan calon kepala daerah dari daerah tersebut untuk memperoleh hasil perolehan suara dengan meinaikan isu putra daerah untuk mengalahkan calon lawan yang tidak mengusung kandidat dari putra daerah wilayahnya

Dalam hal pemilihan kepala daerah, pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau periode (2009- 2014) hingga periode (2019 -2024) didapati bahwa keikutsertaan kandidat pada pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 1.1 Nama Calon Kandidat dan periode Pemiihan

<b>Nama kandidat</b>	<b>Periode</b>
Nyat Kadir dan Zulbahri Majid	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2010 -2015
Aida Zulaikha Nasution dan Eddy Wijaya	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2010 -2015
H.Muhammad Sani dan Soerya Respationo	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2010 -2015
H. Muhammad Sani dan Nurdin Basirun	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2015 -2019
Soerya Respationo dan Ansar Ahmad	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2015 -2019
Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2019-2024
Isdianto dan Suryani	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2019 -2024
Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	Pemilihan Gubernur Tahun Periode 2019 -2024

*Sumber data :KPU Provinsi Kepulauan Riau*

Dari penjelasan tabel diatas diperoleh hasil bahwa dalam pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau terdapat beberapa kandidat yang merupakan calon yang berasal dari bukan putra daerah beberapa nama tersebut dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 1. 2 Nama Kandidat Non Putra Daerah

<b>Nama calon kandidat</b>	<b>Asal</b>
Aida Zulaikha Nasution	Aceh
Zulbahri Majid	Bukit Tinggi, Sumatera Barat
Soerya Respationo	Semarang, Jawa Tengah
Suryani	Cilacap, Jawa Tengah

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Fenomena hal memilih pemimpin yang terdapat di beberapa wilayah masih mengandalkan identitas putra daerah asli yang dipilih untuk memimpin daerahnya. Hal ini membuat peluang pemimpin yang berasal bukan dari daerah asli tersebut gagal bersaing padahal kalau bisa dilihat pemimpin pemimpin bukan dari daerah asalnya juga memiliki kompetensi dalam hal memimpin daerah tersebut .Isu putra daerah seolah tak pernah lepas dalam momentum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diseluruh pelosok tanah air .Selogan pilih putra daerah!’ adalah salah satu bentuk jargon politik atau bentuk komunikasi politik yang merupakan implikasi dari sengitnya pertarungan para kandidat demi upaya untuk mengukuhkan *posisioning* di benak rakyat. Isu putra daerah dalam pemilihan kepala daerah ini sebetulnya kontraproduktif dengan semangat sebagai bangsa dan warga negara indonesia

Sementara itu dalam pelaksanaannya masih terdapat penggorengan isu putra daerah yang dijadikan sebagai rencana dalam meraup suara dalam memenangkan pemilihan kepala daerah dan mengalahkan lawan politiknya terutama apabila kandidat lawan bukan merupakan putra daerah dari wilayah tersebut

Dari penjelasan diatas mengenai isu putra daerah yang sering dijadikan strategi kampanye maka muncul suatu permasalahan mengenai bagaimana nasib peruntungan calon kandidat bukan putra daerah dalam meraup suara dalam pemilihan kepala daerah, walaupun faktor dari pengorengan isu ini bukan menjadi satu satunya faktor yang mempengaruhi dalam pemenangan perolehan suara namun memiliki peran yang cukup penting dalam mendongkrak hasil suara pasangan calon tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh dewi sagita dkk pada perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 di Kabupaten Enrekang dimana didapati hasil dari Pengaruh isu putra daerah terhadap perilaku pemilih sebesar 0,781 dengan nilai signifikansi (sig) =  $0,000 < 0,05$ . Ini ditunjukkan bahwa variabel isu putra daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 di Kabupaten Enrekang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai dari isu putra daerah meningkat 1, maka perilaku pemilih akan meningkat sebesar 0,781. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh Isu Putra Daerah tinggi dan nilainya rata-ratanya 3,62. Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang dihasilkan dari penggorengan

isu putra daerah dalam mendapatkan perolehan suara dalam memenangkan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana isu putra daerah ini terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sendiri melihat dari beberapa pemilihan yang terjadi sebelumnya bahwa mayoritas pemimpin yang memenangkan Pilkada Provinsi Kepri merupakan putra daerah asal provinsi Kepri (Fransin, 2017)

Dari penjelasan tersebut tentunya menjadi sebuah pertanyaan dimasyarakat mengenai bagaimanakah pandangan masyarakat Kota Tanjungpinang mengenai pandangannya terhadap calon bukan putra daerah apabila memiliki kesempatan dalam memimpin wilayah Kepulauan Riau ini. Yang tentunya akan memunculkan satu permasalahan yang ditimbulkan terhadap peluang bukan putra daerah asli dari yang memiliki kompetensi dan kemampuan memimpin yang baik di Kepulauan Riau yang mana sudah memiliki bekal dan kemampuan yang tidak kalah hebat dari putra daerah masyarakat Kepulauan Riau

Oleh sebab itu melihat dari kondisi tersebut maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana peluang yang dimiliki oleh calon kepala daerah putra daerah asli Kepulauan Riau dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini juga akan diteliti tentang pengaruh pandangan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam memilih pemimpinnya terhadap peluang putra daerah dalam memenangkan pemilihan kepala daerah provinsi Kepulauan Riau

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi secara jelas masalah yang diteliti dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian guna mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) bagaimana persepsi masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap identitas putera dan non putera daerah dalam kontestasi ditingkat lokal dan pengaruhnya terhadap peluang calon kandidat pada pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2020

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan ini adapun tujuan penelitian yang akan dibuat adalah sebagai berikut

- a) Mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap identitas putera dan non putera daerah dalam kontestasi ditingkat lokal dan pengaruhnya terhadap peluang calon kandidat pada pemilihan gubernur kepulauan riau tahun 2020



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan negara pada umumnya dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan pada khususnya mengenai pandangan masyarakat terhadap identitas putra dan non putra daerah dalam kontestasi ditingkat lokal
- b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang ilmu pemerintahan dalam membantu proses penelitian yang akan datang

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti tentang permasalahan yang terjadi
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca
- c. Memberi pemahaman Mengenai pengaruh pandangan masyarakat dalam memilih pemimpin terhadap peluang calon bukan putera daerah dalam pemilihan kepala daerah

- d. Untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka yang memerlukan tambahan referensi dan sebagai bahan informasi terkait dengan permasalahan ini

